

**PARTISIPASI ELIT POLITIK PEREMPUAN
DI DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASDEM KOTA
PALEMBANG PADA PEMILU 2019**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana S1 Dalam Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

Rahmat Pratama

NIM : 1657020097

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

2020 M / 1441 H

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jangan pernah menyerah sebelum berusaha, jatuh bangkit lagi, gagal coba lagi, salah cepat perbaiki, karena akan ada hasil yang hebat menanti”

PERSEMBAHAN

Skripsiku ini kupersembahkan kepada:

- 1. Kedua orang tua yang kusayangi dan kubanggakan**
- 2. Adikku tercinta**
- 3. Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**
- 4. Lembagaku UKMK LIT_BANG**
- 5. Keluarga Besar Ilmu Politik C**
- 6. Mabes Hijau 86**
- 7. Teman-teman Ilmu Politik Angkatan 2016**
- 8. Saudara-saudaraku Angkatan D**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Partisipasi Elit Politik Perempuan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Palembang Pada Pemilu 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk partisipasi politik elit dan kader partai perempuan di dewan pimpinan daerah partai nasdem Kota Palembang dan mengetahui dampak dari partisipasi politik perempuan bagi penguatan posisi politik perempuan. Penelitian ini menggunakan teori feminisme dan partisipasi politik dari Rush dan Althoff. Dalam sosiologi Rush dan Althoff partisipasi politik merupakan keterlibatan individu sampai macam-macam tingkatan dalam sistem politik yang tak lepas dari peran politisi profesional, para pemberi hak suara, aktivis-aktivis partai politik, partisipasi politik terbagi dalam hierarki partisipasi politik yang didasarkan atas taraf atau luasnya partisipasi. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini yakni pengurus dan kader partai Nasdem Kota Palembang, khususnya kader Partai dari kaum perempuan. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini berupa berita online, gambar serta foto dan dokumen lainnya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk partisipasi dari elit dan kader perempuan partai nasdem terbagi menjadi dua macam yaitu yang pertama partisipasi elit politik perempuan sebagai calon anggota dewan dari Partai Nasdem pada pemilu 2019 Kota Palembang, serta yang kedua partisipasi para kader dan elit perempuan Partai Nasdem berpartisipasi didalam internal Partai dan mengambil peran penting untuk mengkampanyekan, mensosialisasikan, dan mengenalkan Partai Nasdem kepada masyarakat Kota Palembang, baik untuk seluruh partai secara umum ataupun secara pribadi bagi kader perempuan yang ikut mencalonkan diri. dan dampak dari partisipasi politik perempuan bagi penguatan posisi politik perempuan di Kota Palembang adalah perempuan mempunyai perwakilan dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan perempuan melalui kaum perempuan yang terjun ke dunia politik dan organisasi politik kepartaian terkhusus Partai Nasdem. Selain itu melalui organisasi sayap Partai Nasdem yakni garda wanita yang telah menjalin hubungan dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial sekaligus pengenalan Partai Nasdem, membuat kaum perempuan telah dikenal masyarakat Kota Palembang secara luas, terkhusus sebagai kaum perempuan yang telah mampu untuk berdiri sebagai seorang politisi yang bisa menjadi motivasi kaum perempuan lain di masyarakat untuk lebih berani bersaing dan berjuang untuk keseimbangan gender.

Kata Kunci: Partisipasi, Dampak, Perempuan

ABSTRACT

Regional Leadership Council of Nasdem Party in Palembang during the 2019 election. The purpose of this study is to determine the form of political participation of elites and cadres of women's parties in the regional leadership council of The Nasdem Party in Palembang and to find out the impact of women's political participation on strengthening women's political positions. This study uses the theory of feminism and political participation from Rush and Althoff. In Rush and Althoff's sociology, political participation is the involvement of individuals to various levels in the political system that can't be separate from the roles of professional politicians, voters, political party activists, political participation is divides into a hierarchy of political participation based on its level or extent participation. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The primary data sources in this study were the management and cadres of National Democratic Party in Palembang, especially the party cadres from women. Meanwhile, the secondary data from this research is in the form of online news, pictures, photos and other documents. Data collection in this study are carry out through interview and documentation techniques. The results of this study show that the participation of women cadres and female cadres of the National Democratic Party was divided into two types, the first was the participation of the female political elite as a candidate for board member from Nasdem Party in 2019 election for Palembang, and the second was the participation of female cadres and elite women of the Nasdem Party to participated in internal party and take an important role in campaigned, socialized, and introduced the Nasdem Party to people in Palembang, both for the whole party in general or individually for female cadres who were running for themselves. And the impact of women's political participation for strengthening women's political position in Palembang was that women have representation in fighting for women's rights and interests through women who were involved in politics and political party organizations, especially Nasdem Party. In addition, through the wings organization of Nasdem Party, namely women's guardians who have establish relationships with the community through social activities as well as the introduction of the Nasdem Party, women have become widely known to the people in Palembang, especially as women who have been able to stand as politicians who can motivate other women in society to be more courageous to compete and fight for gender balance.

Keywords: Participation, Impact , Women

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PERSETUJUAN	ii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERYANTAAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
KATA PENGANTAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Penelitian	30
BAB II GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	31
A. Gambaran Umum Kota Palembang.....	31

B. Gambaran Umum Partai Nasdem.....	37
BAB III PEMBAHASAN	50
A. Partisipasi Elit Politik Perempuan DPD Partai Nasdem Kota Palembang Pada Pemilu 2019.....	50
1 Partisipasi Perempuan Nasdem pada internal Partai	55
2 Partisipasi sebagai calon legislatif dari Partai Nasdem	62
3 Proses pencalonan melalui Partai Nasdem Kota Palembang	62
B. Dampak Dari Partisipasi Politik Perempuan Bagi Penguatan Posisi Politik Perempuan Di Kota Palembang	72
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Narasumber wawancara.....	27
Tabel 2.1 Kecamatan Kota Palembang	33
Tabel 2.2 Luas Wilayah menurut kecamatan di kota Palembang.....	34
Tabel 2.3 Jarak dari ibukota kecamatan ke ibu kota Kotamadya	35
Tabel 2.4 Jumlah penduduk berdasarkan kecamatan.....	36
Tabel 2.5 Struktur pengurus DPD Partai Nasdem Palembang	44
Tabel 2.6 Struktur Pengurus Garnita Partai Nasdem Kota Palembang	45
Tabel 2.7 Daftar caleg perempuan partai nasdem	47
Tabel 3.1 Daftar Calon dan perolehan suara Partai Nasdem pada Pileg DPRD Kota Palembang tahun 2019	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Kota Palembang	33
Gambar 2.2 Lambang Partai Nasdem	40
Gambar 3.1 Proses rekrutmen anggota dewan Partai Nasdem.....	66
Gambar 3.2 Banner Tanpa Mahar	67

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah Hirabbilalamin, segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kasih sayang serta hidayahnya dan shalawat pada junjungan nabi besar Muhamad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Partisipasi elit politik perempuan di dewan pimpinan daerah Partai Nasdem Kota Palembang pada Pemilu 2019”**. Dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag, M.Si selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang
2. Prof. Dr. H. Izomiddin, MA Selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik UIN Raden Fatah Palembang
3. Dr. Yenrizal, M.Si Selaku Wakil Dekan I FISIP UIN Raden Fatah Palembang
4. Ainur Ropik, M.Si Selaku Wakil Dekan II FISIP UIN Raden Fatah Palembang
5. Dr. Kun Budianto, M.Si Selaku Wakil Dekan III FISIP UIN Raden Fatah Palembang

6. Dr. Ahmad Syukri Selaku Kaprodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang
7. Ryllian Chandra Eka Viana, MA, Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang
8. Dr. Andi Chandra Jaya, M.Hum, Selaku Pembimbing I
9. Reni Apriani, M.Si Selaku Pembimbing II
10. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Palembang
11. Para Informan yang telah membantu memberikan data dalam skripsi ini
12. Semua Pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas dari skripsi ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikumWarrohmatullahi Wabarokatuh

Palembang, Juni 2020
Penulis

Rahmat Pratama
NIM 1657020097

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bentuk pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah demokrasi, demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang semua warga negara memiliki hak setara dalam berpendapat dan pengambilan keputusan. Demokrasi merupakan bagian dari khazanah dalam membuat keputusan kolektif ataupun sebuah keputusan berdasarkan kesepakatan berbagai pihak yang bersangkutan dalam suatu perkumpulan atau organisasi.

Demokrasi berusaha untuk mewujudkan keinginan bahwa keputusan yang mempengaruhi perkumpulan secara keseluruhan harus diambil oleh semua anggota dan masing-masing anggota mempunyai hak yang sama dalam proses pengambilan/pembuatan keputusan. Dengan kata lain demokrasi memiliki prinsip-prinsip kembar sebagai kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan secara kolektif dan memiliki kesamaan hak dalam mengendalikan hal itu.¹ Demokrasi dapat menjadi indikator tentang sejauh mana prinsip kendali rakyat dan kesetaraan politik dapat diwujudkan serta bagaimana partisipasi rakyat dapat semakin nyata dalam mewujudkan pengambilan keputusan kolektif.

Dalam sebuah demokrasi setiap masyarakat berhak untuk berpartisipasi baik dalam hal partisipasi politik ataupun hal lainnya. Partisipasi politik adalah kegiatan

¹ Mufti dan Naafisah.(2013). *Teori-teori Demokrasi*, Bandung: CV Pustaka Setia.hal.21

seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih dan dipilih pimpinan negara, perwakilan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah.

Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau lobi dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct actionnya* dan sebagainya.

Di negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi partisipasi politik merupakan perwujudan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.

Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam suatu proses politik misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu maka kepentingan mereka akan tersalurkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk keputusan yang mengikat. Dengan kata lain mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik.

Dari penjelasan tersebut, jelaslah bahwa partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak suara dalam penyelenggaraan dalam pemerintah. Perasaan kesadaran seperti ini dimulai dari orang yang berpendidikan, yang kehidupannya lebih baik, dan orang-orang terkemuka.² Partisipasi pada setiap Pemilu merupakan bagian terpenting dari sebuah partisipasi politik. Pemilu pada dasarnya merupakan solusi terhadap salah satu masalah demokrasi modern, masalah perwakilan, yaitu bagaimana mewakili berbagai kelompok, kekuatan politik, kepentingan rakyat atau secara keseluruhan.

Dalam suatu negara demokrasi perwakilan menjadi suatu masalah penting karena negara demokrasi adalah rezim politik yang dengan sungguh-sungguh memperhatikan persamaan hak politik warganya. Hal tersebut bersumber dari konsepsi demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Mengingat demokrasi partisipasi langsung dinilai tidak efektif dalam kondisi negara modern, maka demokrasi perwakilan dijadikan alternatif penting. Perwakilan politik tersebut berawal dari pemilu, sebab elite politik yang muncul ke puncak kekuasaan dipilih oleh pemilih melalui pemilu.

Pemahaman elite politik terhadap Pancasila, UUD 1945, wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan Propernas menjadi sangat penting dalam mencapai dan

² Budiarto Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama hal.367

memenuhi kepentingan nasional Indonesia. Kepentingan nasional tersebut sebagaimana dimaksud dalam alenia ke-4 pembukaan UUD 1945, pada prinsipnya berisi empat cita-cita luhur yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Cita-cita bangsa yang luhur memiliki dukungan persatuan dan kesatuan seluruh komponen bangsa yang dimotori elite politik dalam lingkungan yang berjalan dengan dinamis. Untuk mencapai kondisi ideal sesuai cita-cita nasional yang meliputi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan Propenas. Dengan paradigma nasional tersebut, arah dan strategi serta tata cara pelaksanaannya menjadi jelas, integralistik, dan holistik.³

Reformasi kehidupan politik di Indonesia, dalam persepektif bermasyarakat dan bernegara pada hakekatnya secara keseluruhan berwujud sebagai perubahan tipe-tipe pola perilaku elite politik. Dalam konsepsi politik negara demokrasi seperti Indonesia, maka pemerintah menjelmakan ide kehendak bersama rakyat dan adanya kepercayaan kepada bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Sesuatu yang menarik perhatian dalam penggunaan kekuasaan dalam tata demokrasi adalah penggunaan musyawarah atau konsensus diantara para elite terhadap segala kegiatan pemerintahan. Memiliki peran dalam proses pengambilan

³ Agus Pramono. (2005). *Elit Politik: yang loyo, dan harapan masa depan*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.hal.11

keputusan yang menentukan nasib bangsa dan negara Indonesia, para elite politik sangat menjadi harapan rakyat yang mendambakan proses reformasi dapat berjalan sesuai cita-cita dasarnya. Cita-cita tersebut merupakan cermin nilai-nilai Pancasila, yang berupa ideologi, kepribadian bangsa dan sumber hukum serta tujuan bangsa Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional tersebut sangat diperlukan adanya elite politik yang mampu menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan rakyat. Kekuasaan elite politik pada dasarnya terletak pada partai politik yang tercermin dalam DPR sebagai legislatif di satu pihak, dan kekuasaan eksekutif di pihak lain. Eksekutif dikendalikan dan menjadi kewenangan Pemerintah dalam hal ini Presiden bersama-sama dengan seluruh anggota kabinet dan jajarannya.

Dalam mencapai tujuan elit politik sebagai legislatif harus dilalui dengan terpilih dalam Pemilihan umum yang merupakan salah satu bentuk dari sebuah Demokrasi. Pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Hasil Pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana terbuka dan bebas berpendapat, dianggap mencerminkan partisipasi serta aspirasi masyarakat.

Begitupun dengan para elit perempuan yang terdapat didalam sebuah partai politik yang sering dianggap hanya pelengkap saja. Dalam setiap keikutsertaan elit pada pemilihan umum kebanyakan harus dengan menggunakan sebuah wadah yaitu Partai politik. Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran

serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikondisionalkan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.⁴ Partai politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan bagi perempuan, mendorong dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan Partai politik sebagai saluran kegiatan memengaruhi proses politik.

Dalam setiap prosesnya dalam setiap pemilu sebuah Partai politik pasti membutuhkan peran dari perempuan untuk mencapai tujuan politik mereka baik melalui kader perempuannya sebagai proses rekrutmen baik sebagai anggota parpol, bakal calon anggota dewan, dan bakal calon kepala daerah (pasal 29 ayat (1a). walaupun mindset yang masih tertanam dipublik bahwa perempuan hanya sebatas pelengkap karena ketidakmampuan untuk bersaing didalam sebuah tujuan politik seperti pemilihan umum, dan juga dikebanyakan Partai politik posisi perempuan tidak teralu dianggap strategis dan ada sedikit pembedaan prioritas. Persepsi negatif

⁴ Op-cit. Hal 403

tersebut dilekatkan pada perempuan sendiri telah terstruktur sedemikian rupa dibenak kaum perempuan dan kaum laki-laki.⁵

Perempuan sendiri banyak hanya dipandang sebelah mata dan dianggap makhluk lemah dalam setiap kegiatan politik, walaupun telah banyak nama-nama besar didunia politik yang merupakan seorang perempuan, tetapi hal tersebut hanya beberapa orang saja berbeda dengan laki-laki berada hampir diseluruh posisi dalam dunia politik. Serta dimata masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa seorang perempuan kurang pantas untuk memimpin atau menduduki posisi jabatan politik.⁶

Tetapi ada beberapa Partai politik yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada perempuan untuk terlibat dalam dunia politik dengan pemberian hak dan kewajiban yang sama dengan kader lain seperti halnya Partai Nasdem, partai nasdem mempunyai wadah bagi kader perempuannya untuk berkumpul dalam sebuah organisasi sayap, dimana hal tersebut berguna untuk meningkatkan keaktifan dan memfasilitasi setiap pemikiran-pemikiran dari setiap kader perempuannya yang nanti nya berdampak positif terhadap Partai Nasdem. Selain itu Partai Nasdem membuka kesempatan seluas-luasnya terhadap kader perempuan yang ingin terjun dalam setiap pemilihan baik sebagai kepala daerah ataupun anggota dewan.⁷

⁵ Fatimah Mernisi, *Perempuan di antara logika dan kekuasaan*, (Jakarta: Qanita, 2003) hal. 7

⁶ Elvy Pasaribu, *Indonesia Masa Depan Dari Perspektif Perempuan*, (Salatiga : Yayasan Bina Darma, 2000) hal.12

⁷ Irma Chaniago, Ketua DPP Partai Nasdem, Okezon.com.

Pada tahun 2019 ini Indonesia telah melaksanakan Pemilihan Umum, dimana pada kesempatan ini partai politik ambil bagian dalam Pemilu 2019 sebagai partisipasi politik. Selain hal tersebut Pemilu 2019 Partai politik diharuskan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan legislatif yang tertuang dalam *UU Pemilu no.7 tahun 2017 Pasal 173* yang mewajibkan partai politik mencalonkan legislatif perempuan sebesar 30 % sebagai keterwakilan perempuan sebagai salah satu syarat lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum.⁸

Hal tersebut secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi setiap kader dan elit politik perempuan dari setiap partai Politik terkhususnya Partai Nasdem untuk ikut pemilihan legislatif. Selain menjadi salah satu syarat dalam pendirian dan pembentukan parpol, kuota 30% keterwakilan perempuan juga menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen yang dilakukan oleh parpol, baik untuk menjadi anggota Parpol, bakal calon anggota Dewan, bakal calon kepala daerah dan wakil Kepala Daerah, maupun bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan situs Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (kpu.go.id), sebanyak 20 Partai Politik yang akan menjadi peserta di Pemilihan Umum (PEMILU) 2019. 16 Partai Politik diantaranya adalah Partai Politik Nasional sedangkan 4 Partai Politik lagi adalah Partai Politik Lokal Aceh. 16 Partai Politik Nasional yang berhasil menjadi peserta Pemilu 2019 adalah Partai Politik yang memenuhi persyaratan administrasi dan verifikasi faktual secara nasional yakni keberadaan pengurus inti

⁸ UU Pemilu no.7 tahun 2017

Partai Politik di tingkat pusat, keterwakilan perempuan minimal 30 persen dan domisili kantor pusat di tingkat DPP, memenuhi keanggotaan di 75 persen Kabupaten atau Kota di 34 Provinsi serta status sebaran pengurus minimal 50 persen kecamatan pada 75 persen Kabupaten atau Kota di 34 Provinsi.

Pada Pemilu 2019 yang telah dilaksanakan, anggota DPP-RI yang mewakili keterwakilan Perempuan yang terbesar adalah dari Partai Nasdem yang mengisi kursi DPR-RI 2019, dan ditunjuk-nya Lestari Moerdijat sebagai wakil ketua MPR-RI dari Partai Nasdem, hal ini menguatkan partisipasi perempuan pada pemilu 2019 bagi DPP Partai Nasdem secara Umum dan pada DPD Partai Nasdem Kota Palembang khusus.⁹

Dalam proses pemenuhan kuota minimal perempuan dipersyaratkan mengikuti pemilihan umum, tentu partai politik masih memerlukan rekrutmen untuk memenuhi minimal kuota persyaratan tersebut, untuk menutupi kemungkinan kekurangan yang ada. dalam proses perekrutan bakal calon legislatif, Partai Nasdem dikenal dengan *slogan* “politik tanpa mahar”, Dalam proses pendaftaran bakal calon legislatif partai Nasdem tidak memungut biaya sedikitpun, dan juga proses rekrutmen bakal calon legislatif di partai Nasdem tidak hanya menerima dari kader partai tetapi juga menerima pendaftar dari masyarakat umum. asalkan memenuhi syarat dalam proses pencalonan sebagai anggota dewan yang

⁹ PartaiNasdem.id

telah ditetapkan partai Nasdem.¹⁰ Dengan meniadakan uang pendaftaran dan mahar tersebut pasti didalam pendanaan Partai Nasdem mempunyai sistem tersendiri.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang “Partisipasi Elit Politik Perempuan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Palembang Pada Pemilu 2019 “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana partisipasi elit politik perempuan dewan pimpinan daerah Partai Nasdem Kota Palembang pada pemilu 2019 ?
2. Bagaimana dampak dari partisipasi politik perempuan bagi penguatan posisi politik perempuan di Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk partisipasi elit politik Perempuan di dewan pimpinan daerah Partai Nasdem Kota Palembang pada Pemilu 2019
2. Untuk mengetahui dampak dari partisipasi politik perempuan bagi penguatan posisi politik perempuan di Kota Palembang

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

¹⁰ Data diolah Peneliti dari DPD Partai Nasdem Kota Palembang

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada pembaca dan dapat menjadi referensi yang nantinya dapat memberikan perbandingan dalam mengadakan penelitian pada masa yang akan datang mengenai partisipasi elit politik perempuan di sebuah partai politik

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini sebagai bahan penyesuaian, referensi, dan evaluasi pada setiap individu elit politik perempuan dan kader dari DPD Partai Nasdem kota Palembang sendiri untuk menciptakan SDM yang lebih unggul lagi. Dan penelitian ini juga dapat menjadi tonggak semangat para kaum perempuan untuk tidak takut terjun dan bergabung ke dunia politik khususnya bagi perempuan di Kota Palembang.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan kegiatan penelitian ini, peneliti menganalisis terhadap penelitiannya yang membahas mengenai (partisipasi elit politik perempuan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem kota Palembang Pada Pemilu 2019) telah banyak dibahas beberapa peneliti sebelumnya dan memiliki kaitan dan juga perbedaan.

Pertama, penelitian dari Bambang Wahyudi (2007), yang berjudul *Partisipasi politik perempuan Kota Semarang dalam Pemilu tahun 2004*¹¹. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang. Penelitian tersebut mempunyai kesamaan dalam

¹¹ Bambang Wahyudi, (2019), *Partisipasi politik perempuan Kota Semarang dalam pemilu 2004*, Universitas Negeri Semarang

mencari bentuk partisipasi elit politik perempuan, yang membedakan penelitian tersebut mempunyai lingkup yang lebih luas dalam wilayah penelitian yakni seluruh elit politik perempuan Kota Semarang bukan merujuk pada suatu Partai tertentu. Jenis penelitian mempunyai kesamaan dengan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data yang bersumber dari wawancara.

Kedua penelitian Amelia Idris, dengan judul *Partisipasi politik perempuan di Partai Demokrat pada pemilihan anggota legislatif 2014 Kabupaten Parigi moutong*.¹² Penelitian tersebut mempunyai kesamaan dalam pembahasan tentang bentuk partisipasi politik pada pemilu di dalam partai politik, tetapi juga mencakup penelitian lebih luas ke masyarakat umum. pada penelitian tersebut mencari penyebab rendahnya partisipasi politik perempuan pada pemilu 2014. Yang membedakan juga pada penelitian tersebut juga pada lingkup kepartaian yang berbeda dan wilayah penelitian yang lebih luas, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara kepada narasumber.

Ketiga penelitian Agus Aftah dengan judul *Partisipasi politik perempuan pada Pemilukada 2015 (Studi pada ibu-ibu rumah tangga dikelurahan sidodadi kecamatan Kedaton Bandar Lampung)*.¹³ Penelitian tersebut sama membahas tentang partisipasi politik perempuan, point penelitian menjelaskan pentingnya perempuan

¹² Amelia Idris, 2014, *partisipasi politik perempuan partai demokrat pada pemilu 2014 Kabupaten Parigi*, Kabupaten Parigi

¹³ Agus Aftah, *Partisipasi politik perempuan pada pemilukada 2015*, Bandar Lampung

berpartisipasi dalam politik dan bentuk partisipasi perempuan dalam pemilu. Penelitian tersebut tidak membahas tentang partisipasi perempuan yang tergabung dalam suatu partai politik tetapi membahas cakupan umum dalam lingkup kelurahan di Bandar Lampung yang berbeda dengan yang dibahas penulis yaitu partisipasi perempuan dalam lingkup partai politik, penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Keempat penelitian Samsinar Z Moga, dengan judul *Partisipasi perempuan dalam Partai politik di Kota Palu*.¹⁴ Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis partisipasi perempuan dalam partai politik di Kota Palu. Penelitian tersebut tidak memfokuskan pada satu partai tertentu tetapi dengan membahas beberapa partai sebagai sumber data penelitian, sedangkan penulis membahas partisipasi politik perempuan hanya dalam satu partai politik.

Kelima penelitian Dina Anggita Lubis, dengan judul *Partisipasi politik perempuan di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan*.¹⁵ Penelitian tersebut mempunyai kesamaan dalam membahas partisipasi politik perempuan di dalam sebuah partai politik. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui partisipasi politik perempuan di Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan dilihat dari segi keterwakilannya. Yang membedakan juga, penelitian tersebut tidak membahas partisipasi politik terhadap internal partai. Tipe penelitian tersebut adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif

¹⁴ Samsinar Z Moga, *Partisipasi perempuan dalam partai politik di Kota Palu*, Kota Palu

¹⁵ Dina Anggita Lubis, *Partisipasi politik perempuan di DPD PKS Kota Medan*, Medan

F. Kerangka Teori

1. Feminisme

Perjuangan perempuan di Indonesia selama ini tidak lepas dari isu-isu gerakan perjuangan perempuan di belahan dunia lain. Gerakan perempuan atau yang sering dikenal sebagai feminisme semakin mendapatkan tempat seiring dengan laju perkembangan masyarakat baik berupa kajian-kajian dan dalam tata kehidupan. Feminisme sebagai filsafat dan gerakan dalam masyarakat muncul sebagai sebuah kesadaran, ketika dalam sejarah manusia di dunia menunjukkan realita dimana kaum perempuan (feminim) merasa dirugikan dalam semua bidang dan dinomor duakan oleh kaum laki-laki (maskulin) khususnya dalam masyarakat yang patriarki sifatnya.¹⁶

Keadaan kaum feminim dalam kultur masyarakat serta geliat mereka untuk mendorong, mendesak dalam mendapatkan berbagai akses kehidupan inilah yang kemudian menarik untuk mengkaji proses dan perjuangan perempuan menjadi objek-objek kajian. Disinilah kemudian muncul feminisme sebagai teori. Feminisme sebagai sebuah teori gerakan sosial, memiliki sejarah yang cukup panjang. Penggunaan kata “feminisme” pertama kali oleh Charles Fourier, filsuf Prancis, tahun 1837. Istilah ini kemudian berkembang di Prancis dan Belanda tahun 1872, di Inggris Raya tahun 1890-an dan di Amerika Serikat tahun 1910. Feminisme sebagai suatu istilah yang dipahami secara keilmuan, baru dikenal sejak awal 1970an di Indonesia,

¹⁶ Warsito. (2012). *Sejarah Muncul dan Berkembangnya Feminisme dan gender*. Widiarsarana. 73

terutama sejak tulisan-tulisan ilmiah tentang feminisme bermunculan dalam buku, jurnal-jurnal dan surat kabar.¹⁷ Sampai dengan saat ini, tulisan-tulisan ilmiah itu semakin banyak dan memberi sumbangan pengetahuan luar biasa kepada masyarakat, khususnya bagi kalangan akademik. Menurut penulis, feminisme sebagai teori memberi dasar-dasar ontologis dan epistemologis dalam pergerakan perempuan di Indonesia. Feminisme sebagai gerakan sosial, memberi warna terhadap bangunan demokrasi pada masa lalu sampai sekarang dalam masyarakat Indonesia.

Berbeda dengan isme produk oksiden (Barat) lainnya, diskursus feminisme tidak menggunakan *grand-theory* yang monolitik (Bashin dan Khan, 1988), sehingga tidak ada suatu standar tunggal yang rigid dengan aplikasinya. Dengan demikian feminisme dapat diartikulasikan secara beragam dalam konteks ruang dan waktu serta secara sosio-kultural yang indigenous, dengan catatan bahwa sepanjang suatu aksi atau gerakan ini berangkat dari kesadaran tentang terjadinya penindasan baik fisik maupun mental terhadap perempuan dalam masyarakat. Selanjutnya, kesadaran ini memicu, memotivasi adanya suatu aksi dari perempuan atau laki-laki untuk dengan sengaja merubah keadaan tersebut.¹⁸

Feminis itu sendiri, membentuk kesadaran yang dibangun oleh pengalaman perempuan yang khas tentang kebenaran, pengetahuan dan kekuasaan. Seperti halnya yang terjadi dalam masyarakat, perkembangan berikutnya, feminisme juga mendapat respon yang lain dari isme-isme Barat, seperti kapitalisme, sosialisme,

¹⁷ Ibid. hal76

¹⁸ Dzuhayatin, 2000. *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Presfektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti. Hal.234

modernisme, industrialisme dan bahkan post-modernisme. Feminisme tidak lebih hanya diterimasebagai entitas yang secara substansial tercela dan tidak perlu diberi ruang.¹⁹

Namun, hal ini tidak menyurutkan dan memusnahkan munculnya gerakan feminis sendiri. Kesadaran akan ketertindasan muncul di belahan dunia manapun. Diakui atau tidak, feminisme menjadi suatu fenomena yang mendesak keamanan patriakal yang cenderung mendiskriditkan martabat kemanusiaan perempuan. Kemudian, kesadaran tersebut telah menciptakan paradigma baru yang lebih harmonis untuk laki-laki dan perempuan, serta merumuskan identitas gender yang tidak terlalu tajam terpolarisasi dalam sudut-sudut yang superioritas dan inferior.

Saat ini isu kesetaraan gender telah menjadi hal menonjol dalam platform pembangunan, tidak saja di Indonesia tetapi juga di dunia. Menilik kebelakang, dahulu posisi perempuan dalam politik terpinggirkan, perempuan memiliki porsi yang sangat kecil di banding pria. Hal demikian dikarenakan adanya Budaya Patriarki yang tidak ramah terhadap perempuan. Fham budaya konstruktif sosial-budaya yang di anut kala itu menempatkan Perempuan seolah-olah hanya boleh mengurus persoalan domestik saja.

Persoalan perwakilan dalam politik menjadi penting Manakala telah adanya sebuah kesadaran bahwa dalam kehidupan sehari-hari tidak adanya keterwakilan Perempuan yang terlibat langsung secara proporsional dalam politik. Hal tersebut cukup miris, Karena dilihat dari komposisi penduduk antara laki-laki dan perempuan

¹⁹ Ibid.hal.235

yang hampir berimbang. Sementara bentuk keterwakilan perempuan di legislative masih sangat minim. Sehingga merangkum hal tersebut sangat perlu adanya sebuah revolusi paradigma perempuan dalam politik serta kesetaraan gender.

Saat ini telah adanya revolusi paradigma akan kesetaraan gender kaum feminisme di dalam keterwakilan politik. Berita baiknya adalah Negara telah memberikan ruang yang luas dan ramah bagi kaum perempuan untuk berkiprah dalam politik termasuk menjadi pemimpin. Bahkan hal tersebut telah diperkuat dengan adanya penetapan kuota 30 % keterwakilan perempuan di parlemen pemerintah. Melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat.²⁰

Adanya kuota 30 % keterwakilan perempuan dalam parlemen pemerintah adalah terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk masuk dan membuat keputusan, dan untuk dapat membuat keputusan penting bagi Bangsa dan Negara maka melalui sistem politik perempuan dalam ikut partisipasi. Adanya partai merupakan salah satu wujud partisipasi perempuan dalam keterwakilan politik dengan tujuan mulia dalam usaha mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan gender, kebersamaa dan kejujuran yang mana dalam mengambil bagian penting tidak hanya laki-laki namun perempuan pun sama.

Peran perempuan dalam politik sebagai salah satu kesetaraan gender. Dimana laki-laki berada posisi yang sama. Hadirnya keterwakilan politik sebagai bentuk

²⁰ Nursinta Tuarita, *Perempuan dan politik dalam prespektif feminisme*, Kumparan.com

emansipasi wanita sebagai bagian dari Bangsa dan Negara yang turut serta memperjuangkan dan mencerdaskan kehidupan Bangsa. Hadirnya perempuan dalam keterwakilan politik juga bukan untuk mendikte laki-laki atau anti terhadap laki-laki. Prinsipnya perempuan tidak menganggap laki-laki tidak hebat dari perempuan, tapi juga perempuan tidak merendahkan laki-laki. Perempuan sebagai kaum feminisme memandang bahwa perempuan dan laki-laki memiliki bagian yang seimbang dan berimbang dalam politik namun perempuan tidak melupakan hakekat dan kodrat mereka sebagai Istri dan Ibu.²¹

Dalam penelitian ini teori feminisme mempunyai peran sebagai patokan dalam mencari bentuk gerakan perempuan untuk melakukan sebuah tindakan untuk bebas dari ketimpangan gender, anggapan sebagai makhluk lemah, diskriminasi dan penindasan yang bertujuan untuk mencari persamaan hak dan keseimbangan gender yang mendorong perempuan untuk lebih maju dalam suatu bentuk gerakan seperti berpartisipasi dalam politik.

2. Partisipasi Politik

Dalam Sosiologi politik Rush dan Althoff partisipasi politik merupakan keterlibatan individu sampai macam-macam tingkatan dalam sistem politik. Ada sebuah kesulitan dalam penyajian berbagai bentuk partisipasi politik, terlepas dari tipe sistem politik yang bersangkutan, yaitu: peran Politisi profesional, para pemberi hak suara, aktivis-aktivis partai, dan demonstran. Begitupun juga, penting untuk menempatkan posisi sebenarnya dari aktivitas politik. Partisipasi politik terbagai

²¹ ibid

dalam hirarki yang didasarkan atas taraf atau luasnya partisipasi. Berikut hirarki partisipasi politik:

- a. Menduduki jabatan politik, baik sebagai anggota legislatif maupun anggota birokrasi pada berbagai tingkatan.
- b. Mencari jabatan politik atau administratif
- c. Menjadi anggota aktif dalam organisasi politik (partai politik). Artinya ia menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam organisasi politik, memberi dukungan, keuangan, atau membayar iuran keanggotaan
- d. Menjadi anggota pasif dalam organisasi politik
- e. Menjadi anggota aktif dalam organisasi semi politik (kelompok kepentingan)
- f. Menjadi anggota pasif dalam organisasi semi politik
- g. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya
- h. Partisipasi dalam diskusi politik informal
- i. Partisipasi dalam pemungutan suara

Pada puncak hierarki terdapat orang-orang yang menduduki berbagai macam jabatan dalam sistem politik maupun anggota-anggota birokrasi pada berbagai tingkatan. Mereka itu dibedakan dari partisipasi-partisipasi politik lainnya, dalam hal bahwa pada berbagai taraf mereka berkepentingan dengan pelaksanaan pengaruh oleh individu-individu atau kelompok-kelompok lain dalam sistem politik. Dalam hierarki tersebut konsep partisipasi politik Rush dan Althoff merupakan suatu partisipasi langsung dalam sebuah perpolitikan yang ikut terjun langsung dalam partai politik

atau kelompok kepentingan dan berpartisipasi dalam diskusi politik secara informal yang lebih dcondongkan.

Partisipasi dalam partai politik dan kelompok kepentingan dapat mengambil bentuk yang aktif atau pasif, tersusun mulai dari menduduki jabatan dalam organisasi sedemikian rupa, sampai kepada memberikan dukungan keuangan dengan jalan membayar sumbangan atau iuran keanggotaan. Tidak terdapat perbedaan yang tajam diantara keanggotaan yang aktif dan yang pasif, dan boleh bergerak dari yang satu kepada yang lain sesuai keadaan. Namun demikian tetap ada keterikatan azasi kepada organisasi lewat keanggotaan yang dapat mengandung suatu arti politik, baik untuk organisasi maupun individu, dan dalam mempengaruhi perilaku politik individu yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini berpartisipasi didalam pemilu merupakan bagian dari hierarki yang telah dicetuskan rush dan althoff diatas dalam hal mencari jabatan politik melalui pemilu ataupun menduduki jabatan politik, dan juga point dari pembahasan yang merupakan kader dari suatu partai politik yang terkait dengan hierarki partisipasi politik dalam bergabungnya disuatu organisasi politik atau partai politik yang mempunyai jabatan-jabatan tertentu dalam organisasi politik tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan bentuk dan pembagian teori di atas tersebut penelitian berjudul (Partisipasi elit politik perempuan di DPD Partai Nasdem kota Palembang), akan diteliti menggunakan kerangka teoritik feminisme dan partisipasi politik dari Michael Rush dan Phillip Althoff diatas karena cocok digunakan dalam

penelitian partisipasi elit politik perempuan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem kota Palembang.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara untuk memecahkan masalah penelitian secara sistematis. Itu mungkin dipahami sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana penelitian dilakukan secara ilmiah. di dalamnya kami mempelajari berbagai hal langkah-langkah yang umumnya diadopsi oleh seorang peneliti dalam mempelajari masalah penelitian bersama dengan logika di belakang mereka, para peneliti perlu mengetahui tidak hanya metode/teknik penelitian tetapi juga metodologi.²² berikut ini metode yang akan digunakan peneliti di dalam penelitian:

1. Pendekatan/Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian dengan pencarian fakta dengan pertanyaan dari jenis yang berbeda dan tujuan dari penelitian tipe ini adalah menggambarkan keadaan seperti yang telah terjadi saat ini, sehingga penulis tidak memiliki kontrol atas variabel tetapi hanya bisa melaporkan apa yang telah terjadi²³ dalam penelitian ini letak deskriptifnya adalah berupa uraian kalimat yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang benar-benar ada serta berkaitan dengan partisipasi politik perempuan di partai Nasdem Kota Palembang. pendekatan yang

²² C.R Kothari, (1990). *Research Methodologi, Methods adan Techniques (Second Revises Edition)*, India: Age International, hal. 8

²³ *Ibid*, hal 2

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif, yaitu penelitian yang berkaitan dengan fenomena atau melibatkan suatu jenis perilaku manusia²⁴ penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang digunakan menganalisis kehidupan sosial dengan cara menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (*informal*) dalam latar alamiah. dengan kata lain, penelitian kualitatif berupaya menjelaskan bagaimana seorang individu melihat, menggambarkan, atau memaknai dunia sosialnya. pemaknaan ini merupakan hasil interaksi sosialnya²⁵ Prosedur dari penelitian bersifat menjelaskan, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata atau kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

2. Data dan Sumber data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data *primer*, adalah data yang di peroleh langsung dari para informan dan key informan (orang yang memberikan informasi) dalam penelitian ini yaitu, pengurus, kader, dan organisasi sayap partai perempuan yaitu Garda wanita Nasdem, data primer dari informan yang tersusun sebagai berikut:

- a. Ketua Garda Wanita Partai Nasdem Kota Palembang
- b. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Kota Palembang
- c. Wakil bidang kesehatan perempuan dan anak

²⁴ *Ibid*, hal 3

²⁵ Nanang martono. (2016). *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.

- d. Wakil bidang pertanian dan kemaritiman
- e. Wakil bidang Otonomi Daerah
- f. Bendahara Umum Partai Nasdem Kota Palembang
- g. Kader sekaligus anggota garda wanita Partai Nasdem Kota Palembang

kepada para informan tersebut akan di tanyakan partisipasi, sebagai bagian dari DPD Partai Nasdem Kota Palembang dalam pemilu 2019 dan partisipasi sosial pada masyarakat Kota Palembang.

Kemudian data *Sekunder*, data ini merupakan data pendukung/penunjang dari data primer seperti buku, jurnal, himbauan-himbauan, foto-foto, dokumen dan berita sehingga dapat mendukung yang berkaitan dengan Partisipasi politik perempuan di DPD Partai NASDEM kota Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara, adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.²⁶ proses dalam wawancara adalah tanya jawab secara lisan oleh dua orang atau lebih untuk mendengarkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan, wawancara bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang rinci, berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi kader, dan anggota organisasi sayap Garda Wanita Nasdem Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Palembang. Alasan peneliti menanyakan kepada informan tersebut, untuk mengetahui partisipasi dan kontribusi

²⁶ Sutrisno hadi, (1987), *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, hal. 193.

mereka sebagai bagian dari Kader partai untuk mengenalkan partainya pada masyarakat sekitar dalam ajang pemilu 2019 di Kota Palembang. setelah itu peneliti akan mencatat atau merekam baik rekaman suara ataupun video sesuai kebutuhan lapangan untuk menjadi bukti dan data dari hasil wawancara tersebut.

Narasumber wawancara tersusun dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Narasumber wawancara

	Nama	Umur	Pekerjaan	Jabatan
1.	Armawan, SE	52 Tahun	Politisi	Sekretaris Jendral
2.	Sofiah,SH	50 Tahun	Pengusaha	Ketua Garnita Nasdem
3.	Yoce Valentina, Amd.Kep	43 Tahun	Pegawai Partai	Wakil Ketua Bidang Kesehatan perempuan dan anak
4.	Mega Apriani A.md	38 Tahun	Pengusaha	Wakil ketua bidang pertanian dan kemaritiman
5.	Ratih Purwanti	40 Tahun	Ibu rumah Tangga	Wakil ketua bidang otonomi daerah
6.	Maretha Zulkendri,SH	44 Tahun	Politisi	Bendahara Umum
7.	Rifi Aprilia,SH	39 Tahun	Politisi	Anggota dewan pembina Garnita

Sumber: Partai Nasdem Kota Palembang

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.²⁷ Pengumpulan data yang akan dilakukan dengan mengadakan kajian dokumen untuk membantu menunjang data penelitian seperti foto-foto, arsip, berita-berita, video himbauan-himbauan, maupun catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Penetapan lokasi penelitian yang merupakan tahap sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkan lokasi penelitian berarti objek dan tujuan bisa ditetapkan sehingga mempermudah peneliti melakukan penelitiannya, sedangkan fokus dari penelitian ini adalah partisipasi dan kontribusi elit politik, kader dan organisasi sayap partai perempuan Garda Wanita Nasdem

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan serta menganalisis data hasil wawancara dengan narasumber dari partai nasdem yang telah diperoleh dan selanjutnya

²⁷ Nanang martono. (2016). *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 80

dijabarkan dalam bentuk penjelasan dari penulis mengenai isi dari jawaban pertanyaan penelitian. di dalam analisis data kualitatif menurut Nanang Martono²⁸ teknik analisa data yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini antara lain menggunakan empat tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini data mentah diperoleh melalui wawancara dari informan mengenai bentuk partisipasi elit perempuan di Partai Nasdem Kota Palembang yang telah ditentukan penulis, data tersebut berisi tentang hasil jawaban atas pertanyaan penulis tersebut. Data tersebut dicatat secara tertulis, ataupun didokumentasikan dengan rekaman suara, hasil dari data yang telah diperoleh kemudian akan dikumpulkan menjadi data mentah bentuk-bentuk partisipasi yang akan direduksi penulis.

2. Reduksi Data

Data mentah yang telah didapatkan dari narasumber akan dikumpulkan untuk selanjutnya penulis akan melakukan proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakkan, dan perubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika berada di lapangan, serta data tersebut akan dikaitkan dengan teori yang ada. proses ini dilakukan di akhir penelitian setelah semua data terkumpul. pada tahap ini penulis menyaring informasi yang didapat melalui wawancara dari informan. Penyederhanaah kata, perubahan kata agar mudah dipahami pembaca sehingga menjadi sebuah data yang siap disajikan.

²⁸ *Ibid*, hal 11

3. Penyajian Data

Data yang telah direduksi akan disiapkan menjadi data yang telah menjadi sebuah hasil penelitian, kemudian penulis akan menyajikannya dalam sebuah hasil pembahasan mengenai partisipasi elit politik perempuan Partai Nasdem pada Pemilu 2019 yang telah berkaitan dengan konsep teori yang dipakai. penyajian data cenderung mengarah pada penyerdehanaan data kompleks keadaan kesatuan bentuk yang sederhana dan selektif sehingga mudah untuk dipahami pembaca.

4. Penarikan Kesimpulan

Hasil data yang telah jadi akan dirumuskan dalam sebuah kesimpulan. pada tahap ini penulis akan menggambarkan pernyataan singkat hasil analisis dan makna penting dari hasil penelitian yang telah disajikan dan mencakup semua point utama yang ada didalam pembahasan.

H. Sistematika Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentu adanya tahapan-tahapan atau sistematika yang dijadikan panduan dalam penelitian. sistematika laporan yang akan peneliti buat terdiri dari bab-bab dan sub-sub bab yang di rangkum dalam 4 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang keseluruhan isi skripsi yang akan dibuat meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian , dan sistematika penulisan dan daftar pustaka

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara rinci mengenai lokasi dari objek yang diteliti. Pada bab ini menjelaskan lokasi penelitian yaitu Kota Palembang secara umum dan DPD Partai Nasdem Kota Palembang secara khususnya

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil data data yang didapatkan mengenai bentuk partisipasi elit politik perempuan Partai Nasdem dan dampak dari partisipasi politik perempuan terhadap penguatan posisi perempuan, kemudian data yang diperoleh oleh peneliti akan dibahas bagaimana keterkaitannya dengan teori yang sudah ada. Serta menjelaskan hasil temuan berdasarkan sudut pandang subjek dengan sudut pandang teoritis.

BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan point-point penting yang terdapat pada pembahasan dari penelitian tentang partisipasi elit perempuan Partai Nasdem Kota Palembang, dan penulis memberikan masukan dalam bentuk saran.